



# Jadikan Difabel sebagai Mitra

## KPU Sebut Hak Pilih Warga Difabel Tak Bisa Dikesampingkan

**YOGYA, TRIBUN** - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta menyelenggarakan seminar terkait Pemilu yang melibatkan perwakilan difabel di Pendopo KPU Kota Yogyakarta, Sabtu (28/4).

Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budi-yanto menjelaskan, kegiatan tersebut digunakan untuk menjadikan difabel sebagai mitra yang nantinya menjadi agen sosialisasi untuk kelompoknya pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

"Meskipun secara umum strategi KPU lebih ke pendekatan berbasis keluarga. Misalkan masuk di pertemuan ibu-ibu tingkat RT. Informasi ke ibu atau bapak, nanti bisa ketemu ketika di rumah mereka membahas soal pemilu," bebernya.

Strategi tersebut juga diterapkan pada kaum

**Kalau orang lain mencoblos yang bukan jadi keinginan tunanetra tersebut, kan juga salah**

**Wawan Budi-yanto**

difabel. Wawan meyakini bila yang menyampaikan informasi mengenai pemilu adalah mereka yang juga berada di posisi sama, maka pengertian dan pemahaman tersebut akan lebih mudah untuk dicerna. "Sama halnya dengan anak muda. Lebih mudah kalau yang menjelaskan juga anak muda," tambahnya.

Upaya KPU untuk menggandeng difabel sebagai mitra, juga sekaligus digunakan untuk menggugah minat mereka untuk menggunakan hak pilihnya. Wawan menegaskan, sekalipun memiliki keterbatasan misalkan tunanetra atau tunarungu, mereka tetap memiliki hak untuk bebas menentukan pilihannya.

"Misalkan tunanetra, dipandu untuk mencoblos, kan tidak nyaman. Atau didampingi dan yang mencobloskan orang lain. Kalau orang lain mencoblos yang bukan jadi keinginan tunanetra tersebut, kan juga salah," ujarnya.

Wawan menuturkan, tidak ada yang spesial untuk kertas suara bagi difabel. Misalkan saja tunanetra. Pihaknya sengaja tidak mencetak surat suara dengan menggunakan huruf braille.

"Misalkan di TPS tersebut hanya ada satu tunanetra. Nanti kalau surat suara menggunakan braille, jadi ketahuan dia pilih siapa. Untuk tunanetra kertas suara tetap sama, namun kita sediakan alat bantu khusus untuk mengenali kolomnya," urainya.

Pada Pilkada 2017 lalu, lanjutnya, ada Surat Ketua KPU Pusat terkait perintah agar KPPS dan saksi mendatangi pemilih yang sakit atau tidak memungkinkan datang ke TPS. "Harapannya nanti 2019 diperkuat dengan Peraturan Pemerintah sehingga lebih kuat regulasinya," ujarnya. **(kur)**

## Saatnya Difabel Masuk Parlemen

**PERWAKILAN** Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak Kota Yogyakarta, Rini Rindawati mempertanyakan kenapa tidak ada perwakilan difabel dalam perebutan kursi legislatif.

"Asyik kalau memang ada yang berani jadi anggota dewan (dari difabel). Paling enggak ada

suara disabilitas yang terwakili, memberi masukan kebijakan di Kota Yoga," ucapnya.

Rini mengatakan, bahwa kecerdasan rekan-rekannya sesama difabel pun sebenarnya tak kalah dari yang lain. Mulai dari tingkat kota hingga kancah internasional.

Namun mereka lebih banyak berkecimpung di dunia pemerintahan, sosial, budaya, dan tidak memilih politik sebagai jalan hidupnya. "Mungkin karena kadang ada rasa kurang percaya diri, makanya tidak memilih jalur politik," ungkapnya. **(kur)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005